

**PENGARUH *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* DAN  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA  
APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan  
Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:  
RIPKI ZAINAL  
NPM: 1851010143**

**Program Studi: Ekonomi Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/2023M**

**PENGARUH *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* DAN  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA  
APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan  
Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**RIPKI ZAINAL  
NPM: 1851010143**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing 1 : Prof.Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.SI  
Pembimbing 2 : Siska Yuli Anita,, M.M**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pemerintah mempunyai peran besar dalam pembuatan program pelayanan dan kebijakan. Kurangnya tingkat pemberdayaan sumber daya manusia pada aparatur pemerintah juga masih terjadi di Indonesia, mengakibatkan belum maksimalnya kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa ? dan Bagaimana pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam perspektif ekonomi islam. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa ? dan Mengetahui pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam perspektif ekonomi islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan penelitian korelasional. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan skala likert dan dokumentasi. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Pemerintah Desa di kecamatan pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah 128. Peneliti menetapkan jumlah sampelnya sebanyak 97 responden.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *good village governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. secara simultan variabel Pengendalian Internal (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah desa di kecamatan pesisir Utara. Aparatur pemerintah desa sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi dilihat empat pilar ekonomi menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang juga di jadikan pedoman dalam bekerja oleh aparatur desa di kecamatan pesisir utara yaitu tauhid, kebermanfaatn, adil dan etika.

**Keywords : Good Village Governamce, Pengendalian Internal, Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.**

## ***ABSTRACT***

The government has a big role in making service programs and policies. The lack of empowerment of human resources in government apparatus is also still occurring in Indonesia, resulting in not maximizing government performance in public services. The formulation of the research problem is how does good village governance and internal control influence the performance of village government officials? and How does good village governance and internal control influence the performance of village government officials in an Islamic economic perspective. The purpose of this study was to determine the effect of good village governance and internal control on the performance of village government officials? and Knowing the effect of good village governance and internal control on the performance of village government officials in an Islamic economic perspective.

The research method used is a quantitative approach. This type of research used correlational research. The data collection method used was a questionnaire with a Likert scale and documentation. The population in this study were all Village Government Apparatuses in the North Coast sub-district of Pesisir Barat Regency, totaling 128. The researcher determined that the sample size was 97 respondents.

Based on the test results, it shows that good village governance and internal control affect the performance of village government officials. simultaneously the variable Internal Control (X2) has a significant effect on the performance of village government officials in the North Coast sub-district. Village government officials have implemented Islamic principles in economic activities, seen from the four economic pillars according to Islam, as exemplified by the Prophet Muhammad SAW, which were also used as guidelines for work by village officials in the North Coast sub-district, namely monotheism, usefulness, fairness and ethics.

**Keywords: Good Village Governance, Internal Control, Village Government Apparatus Performance.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ripki Zainal  
Npm : 1851010143  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Good Village Governance* Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)**” Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun Sendiri, Bukan Duplikasi Ataupun Plagiat Dari Karya Orang Lain Kecuali Pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis



Ripki Zainal  
NPM. 1851010143



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

---

### PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : Pengaruh *Good Village Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)

**Nama** : Ripki Zainal  
**NPM** : 1851010143  
**Program Studi** : Ekonomi Syari'ah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.Si**  
**NIP.198008012003121001**

  
**Siska Yuli Anita, M.M**  
**NIP.19919012019032036**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah**

  
**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**  
**NIP.198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul Pengaruh *Good Village Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat). Disusun Oleh Ripki Zainal, NPM : 1851010143, Program Studi Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Jum'at/24 Februari 2023

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang : Dr.H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag**

**Sekretaris : Raizky Rienaldy Pramasha, M.E.**

**Penguji I : M. Yusuf Bahtiar., M.E**

**Penguji II : Siska Yuli Anita, M.M**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A**

**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

*“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib/keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah nasib/keadaan mereka sendiri...”*

*(Q.S. Ar-Ra'ad :11)*





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah, teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, karunia, nikmat, dan kemudahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada Kedua orang tuaku Bapak Bahran dan ibuku tercinta Mutiara Jannah yang selalu memberiku support, doa, semangat, motivasi, dan segalanya. Mereka sangat berperan dalam penulisan skripsi ini, mereka sangat berharga bagiku dengan segala pengorbanan yang sangat luar biasa dan takkan pernah bisa aku membalasnya, Kakak-kakak ku tersayang Setia Mustika, Eva Susanti, dan Ridho Saputra dan Almammater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## RIWAYAT HIDUP

Ripki Zainal, dilahirkan pada tanggal 02 Desember 2000 di desa Way Narta Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. Anak keempat dari pasangan Bapak Bahran dan Ibu Mutiara Jannah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kota Karang yang sekarang menjadi SDN 93 Krui selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pesisir Utara yang sekarang menjadi SMPN 20 KRUI selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Ma'had Al-Hidayah Pringsewu pada tahun 2016, Kemudian pindah ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pesisir Barat selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik Tahun 2018 dan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung organisasi yang diikuti yaitu tergabung dalam organisasi UKM Bapinda, HMPS ES (Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah), IKAMM PESBAR (Ikatan Mahasiswa Muslim Pesisir Barat) dan Potensial Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan ilmuNya kepada semua makhluk. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Pengaruh *Good Village Governance* Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat)”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, bimbingan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk hal itu maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Tulus Suryanto, SE., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II dan III.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi.
3. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.SI dan Siska Yuli Anita,. M.M selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis hingga dapat terselsaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hamidi dan jajarannya selaku camat di kecamatan pesisir utara yang telah memberikan izin dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
5. Seluruh aparatur pemerintah desa di kecamatan pesisir Utara yang bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung telah memberikan ilmu yang berarti.

7. Bapak dan ibu pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang selalu senantiasa membantu dalam menyediakan literatur bagi penulis.
8. Orang tuaku, kakak-kakak ku, dan semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi keberhasilanku.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan ekonomi syariah angkatan 2018, terkhusus temen temen kelas C.
10. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akhir kata penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat berguna untuk kita semua.



Bandar Lampung, 23 Januari 2023

Penulis

**Ripki Zainal**

1851010143

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS .....</b>	<b>23</b>
A. Landasan Teori.....	23
1. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.....	23
a. Pengertian Kinerja Dan Aparatur Desa.....	23
b. Tugas Dan Fungsi Aparatur Desa .....	25
c. Indikator Kinerja Aparatur Desa.....	29
d. Kinerja dalam pandangan Islam .....	31
2. <i>Good Village Governance</i> .....	33
a. Pengertian <i>Good Village Governance</i> .....	33
b. Prinsip-Prinsip <i>Good Village Governance</i> .....	34
c. <i>Good Village Governance</i> Dalam Pandangan Islam.....	37
3. Pengendalian Internal.....	40
a. Pengertian Pengendalian Internal .....	40
b. Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal.....	42

c.	Tujuan Pengendalian Internal .....	43
d.	Unsur-Unsur Pengendalian Internal.....	44
e.	Pengendalian Internal dalam Pandangan Islam.....	47
4.	Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	50
B.	Pengajuan hipotesis .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>55</b>
A.	Waktu Dan Tempat Penelitian.....	55
B.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	55
C.	Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data .....	56
D.	Definisi Operasional Variabel .....	60
E.	Instrumen Penelitian.....	62
F.	Uji Validasi Dan Reliabilitas Data .....	63
G.	Uji Prasyarat Analisis .....	65
H.	Uji Hipotesis.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN .....</b>		<b>71</b>
A.	Hasil Penelitian .....	71
1.	Deskripsi Data.....	71
a.	Responden Berdasarkan Usia .....	71
b.	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	72
c.	Responden Berdasarkan Pendidikan.....	72
2.	Hasil Pengujian Instrument Penelitian .....	73
a.	Hasil Uji Validitas .....	73
b.	Hasil Uji Reliabilitas .....	76
3.	Analisis Data Hasil Penelitian.....	78
a.	Hasil Uji Prasyarat Analisis.....	78
b.	Hasil Uji Hipotesis .....	82
B.	Pembahasan.....	87
1.	Pengaruh <i>Good Village Governance</i> Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Pesisir Utara.....	87
2.	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Pesisir Utara .....	90
3.	Pengaruh <i>Good Village Governance</i> Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Pesisir Utara.....	91
4.	Pengaruh <i>Good Village Governance</i> Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desaa Di Kecamatan Pesisir Utara	

Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi  
Islam ..... 92

**BAB V PENUTUP ..... 105**  
A. Kesimpulan ..... 105  
B. Rekomendasi ..... 106

**DAFTAR RUJUKAN**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
Tabel 3.1	Populasi Penelitian .....	57
Tabel 3.2	Indikator Variabel.....	62
Tabel 3.3	Kriteria Penskoran Jawaban .....	63
Tabel 4.1	Data Responden Berdasarkan Usia.....	71
Tabel 4.2	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	72
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Variabel Good Village Governance.....	73
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal .....	74
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pemerintah Desa.....	75
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Ekonomi Islam .....	75
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Good Village Governance.....	76
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Internal ....	77
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Pemerintah Desa.....	77
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ekonomi Islam.....	78
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas.....	79
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinearitas .....	80
Tabel 4.14	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	81
Tabel 4.15	Hasil Uji Autokorelasi.....	82
Tabel 4.16	Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji T) .....	83
Tabel 4.17	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	84
Tabel 4.18	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	85
Tabel 4.19	Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

Angket Penelitian

Data Responden Dan Jawaban

Hasil Uji Validitas SPSS

Izin Penelitian Dan Balasan

Dokumentasi Penelitian



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Salah satu hal yang paling utama dalam membuat suatu karya ilmiah atau skripsi adalah judul, sebagai tema besar dalam menggambarkan terkait apa yang akan disampaikan di dalamnya. Maka untuk menghindari terjadi kesalahan dalam memahami makna akan judul dari penelitian ini, peneliti perlu untuk memberikan uraian dan penegasan terhadap arti dan maknanya sebagai berikut:

#### 1. *Good Village Governance*

*Good Village Governance* pada dasarnya dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Good Governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Menurut Moch pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik.<sup>1</sup>

#### 2. Pengendalian Internal

Menurut Arens (dalam Fierda, 2016: 35), Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Indikator

---

<sup>1</sup> Putu Lia Helmayani et al., “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Badan Permusyawaratan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi *Good Village Governance*”, Vol. 8 (2017), p. 2.,

yang digunakan didalam penelitian ini adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko.<sup>2</sup>

### **3. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

Menurut Mahsun (2006) kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

### **4. Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang & jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>4</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik dituntut agar memiliki kinerja yang ditujukan pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk tanggap terhadap lingkungan disekitarnya, dengan cara memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta

---

<sup>2</sup> Fitriya Anggraini and Praptiestrini, “Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa”, Vol. 3 No. 2 (2021), p. 111–120,.

<sup>3</sup> Ahmad Mustanir et al., “Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”, Vol. 2 No. 1 (2018), p. 67–84,

<sup>4</sup> Maharani Dewi, “Ekonomi-Islam-Solusi-Terhadap-Masalah”, Vol. 9950 No. June (2018), p. 20–34, (On-line),

adanya pembagian tugas yang baik pada struktur suatu organisasi pemerintahan. Kinerja organisasi publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial organisasi tersebut sebagai pelaksana pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam mencapai kinerja yang baik. Menurut Steers, pengertian kinerja adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai.<sup>5</sup>

Pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil. Hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.<sup>6</sup> Pemerintah desa memiliki tugas utama, diantaranya: 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa diantaranya yaitu penerapan *good governance* dan pengendalian internal. Secara definitif *good governance* dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

---

<sup>5</sup> Beatrix C.A. Muabuay 1 et al., “Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengelolaan Prasarana Olahraga Di Kabupaten Mimika”, Vol. 1 No. 1 (2021), p. 1–8..

<sup>6</sup> Ahmad Soleh, “Strategi Pengembangan Potensi Desa”, Vol. 5 No. 1 (2017), p. 35–52..

penghindaran alokasi dana investasi yang salah dan pencegahan korupsi maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>7</sup> Paradigma *good governance* ini lebih menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani,<sup>8</sup>. Untuk mencapai *good governance* UNDP (United Nations Development Program) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.<sup>9</sup>

Adapun sistem pengendalian internal yang juga sangat mempengaruhi kinerja aparatur desa, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal yaitu proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tercapainya tujuan dari suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai.<sup>10</sup> Menjalankan sistem pengendalian internal dengan tepat dapat mengarahkan dan mengontrol setiap organisasi pemerintahan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem pengendalian internal bertujuan agar instansi mampu

---

<sup>7</sup> Astri Damayanti and Ardi Hamzah (Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo), “*Pengaruh E-Procurement Terhadap Good Governance*”, 2019, p. 1–11.

<sup>8</sup> Rustam, Memen Suwandi, and Namla Elfa Syariati, ‘KONSEP AMANAH: PENGELOLAAN DANA DESA MENUJU GOOD VILLAGE GOVERNANCE’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Uin-Alauddin.*, VII.2 (2021), 237–59.

<sup>9</sup> Achmad Aminudin, ‘Implementation of Good Village Governance in Village Development’, *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3.1 (2019), 1

<sup>10</sup> Mattoasia et al., “*Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Mattoasia*,”, Vol. 2 No. 2 (2021), p. 100–109.

mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan dalam setiap tahunnya. Semakin tinggi sistem pengendalian internal yang diterapkan maka akan berdampak baik terhadap kinerja instansi pemerintah. Menurut COSO (Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission), terdapat lima komponen pengendalian internal yang harus diterapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sementara tujuan-tujuan pengendalian internal yang dirumuskan oleh (Arens: 2017) yaitu sebagai berikut: 1. Realibilitas pelaporan keuangan 2. Efisiensi dan efektifitas operasi 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil (output) dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian intern tercapai, maka pemerintah harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari perkembangan saat ini dengan adanya keterbukaan informasi dan kebebasan menyampaikan pendapat, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, pemerintah yang berperan dalam pemberi layanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara adil dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahnya memegang teguh pada 3 dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu bidang lingkungan, ekonomi dan sumber daya manusia. Konsep good governance ini memiliki keterkaitan dengan 3 aktor utama, yaitu: Pemerintah sebagai penyelenggara negara, korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak-pihak tersebut menjadi jawaban

---

<sup>11</sup> Wulanintan Pricilla Rumamby et al., “Evaluasi Implementasi Pengendalian Internal Berbasis Coso Pada PT. Moy Veronika”, Vol. 9 No. 2 (2021), p. 261–268,.

besar, namun dengan keadaan Indonesia saat ini nampak masih sulit untuk semua ini dapat dicapai.<sup>12</sup>

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan, dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Sehingga pengimplementasian *good governance* ini belum dapat dikatakan baik dan berhasil sepenuhnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi masih tinggi, kemudahan dalam berbisnis masih tertinggal jauh dari Negara-negara sekitar, indeks daya saing global masih sangat rendah, dan indeks pembangunan manusia pun masih rendah serta indeks efektifitas pemerintahan masih tertinggal jauh dari Negara-negara ASEAN. Sistem pengendalian internal pun belum memadai, tercermin dari buruknya kualitas laporan keuangan, yang banyak ditemukan beulang dari tahun ketahun. Suatu sistem pengendalian yang baik tidak akan bisa diimplementasikan apabila tidak ditunjang dengan kualitas SDM, yang meliputi pendidikan, pengalaman, pelatihan dan pengetahuan, keterampilan serta perilaku.

Kecamatan Pesisir Utara yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat pun tak terlepas dari permasalahan diatas, dari 12 desa yang ada di Kecamatan Pesisir Utara belum sepenuhnya bisa dikatakan berhasil dalam penerapan *good governance*, terlebih lagi Pesisir Barat masih tergolong sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang masih minim pembangunannya. Hal ini terlihat dari pembangunan desa dan tata kelola yang kurang maksimal, mulai dari kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat, belum adanya perubahan dalam pengelolaan pemerintahan, minim pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat yang kurang tersentuh dan fasilitas publik yang belum terbangun dan juga terkelola dengan baik,

---

<sup>12</sup> *Fitria Andalus Handayani and Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia", Vol. 11 No. 1 (2019), p. 1–11, <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.*

pengalokasian dana desa dan dana bantuan terlihat belum tepat sasaran, daya dukung terhadap kegiatan kepemudaan kurang maksimal serta kurangnya kedisiplinan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga kinerja pemerintah desa nampak tidak tercapai dan tidak terlaksana dengan baik. Dan rentan rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini belum ada perubahan yang signifikan dan program pemerintah desa pun terkesan monoton serta kesalahan yang sama cenderung terjadi berulang-ulang tanpa ada upaya menyelesaikan.

Hal ini juga serupa dengan apa yang disampaikan oleh pak Hamidi, pak Jef Person dan pak Muhammad Edwar selaku Camat, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 02 Desember 2022, mengatakan bahwa desa di kecamatan pesisir utara dalam pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal karna aparatur pemerintah desa dalam penguasaan IT dan manajemen masih bisa dikatakan kurang, tata kelola administrasi dan pelaporan masih cukup rendah dan kualitas produk produk hukum di desa masih kurang dalam memberikan arah pelaksanaan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel. kemudian kinerja badan permusyawaratan desa juga belum maksimal dalam menjalankan fungsinya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu juga prasarana dasar terutama dalam infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi belum terbangun. Dan pemeliharaan infrastruktur di desa masih belum tersistem dan terlembaga dengan baik, bahkan ada beberapa infrastruktur penunjang yang belum terpelihara dengan maksimal. Serta kegiatan kegiatan yang terkait dengan kerohanian dan spiritual masih jarang dilaksanakan, hanya dilaksanakan sewaktu waktu dan belum terlembaga dengan baik.

Islam menegaskan bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsep dan amanat. Hendaknya setiap pemimpin dalam pelaksanaan amanahnya



harus dilandaskan dengan syariat Allah dan menjalankan dengan sebaik baiknya semata mata untuk kemaslahatan ummat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hajj (22): Ayat 41 :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'nif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Ayat diatas menyatakan bahwa mereka itu adalah *orang-orang yang jika* Kami anugerahkan kepada kemenangan dan *Kami teguhkan kedudukan mereka* di muka bumi, yakni Kami berikan mereka kekuasaan mengelola satu wilayah dalam keadaan mereka merdeka dan berdaulat *niscaya mereka* yakni masyarakat itu *melaksanakan shalat* secara sempurna rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya *dan mereka juga menunaikan zakat* sesuai kadar waktu, sasaran dan cara penyaluran yang ditetapkan Allah, serta mereka *menyuruh* anggota-anggota masyarakat agar *berbuat yang ma'ruf*, yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik dalam masyarakat itu, lagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah *dan mereka Mencegah*

dari yang *munkar*; yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat, *dan kepada Allah-lah kembali segala urusan*. Dialah yang memenangkan siapa yang hendak dimenangkan-Nya dan Dia pula yang menjatuhkan kekalahan bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia juga yang menentukan masa kemenangan dan kekalahan itu. Ayat diatas mencerminkan sekelumit dari ciri-ciri masyarakat yang diidamkan Islam, kapan dan dimanapun, dan yang telah terbukti

dalam sejarah melalui masyarakat Nabi Muhammad saw. dan para sahabat beliau.

Masyarakat itu adalah yang pemimpin-pemimpin dan anggota-anggotanya secara kolektif dinilai bertakwa, sehingga hubungan mereka dengan Allah swt. sangat baik dan jauh dari kekejian dan kemunkaran, sebagaimana dicerminkan oleh sikap mereka yang selalu *melaksanakan shalat* dan harmonis pula hubungan anggota masyarakat, termasuk antar kaum berpunya dan kaum lemah yang dicerminkan oleh ayat diatas dengan *menunaikan zakat*. Disamping itu mereka juga menegakkan nilai-nilai yang dianut masyarakat, yaitu nilai-nilai *ma'ruf* dan mencegah perbuatan yang *munkar*. Pelaksanaan kedua hal tersebut menjadikan masyarakat melaksanakan kontrol sosial, sehingga mereka saling ingat mengingatkan dalam hal kebajikan, dan saling mencegah terjadinya pelanggaran.<sup>13</sup>

Ayat diatas mengindikasikan persoalan *good governance* dalam pandangan fiqh, penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan berorientasi pada, (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat dilambangkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan *good governance* dengan tiga aspek, yaitu; (1) spiritual governance, (2) economic governance, (3) political governance. Good governance sebagai sebuah upaya masalah haruslah memenuhi beberapa kriteria yang disimpulkan dari penjelasan beberapa pakar ushul fiqh, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan haruslah sesuai dengan maqhashid alsyari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qath'i, baik wurud maupun dalalah-nya.

---

<sup>13</sup> Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2001

Prinsip-prinsip *good governance* seperti yang telah dilihat di atas dapat ditemukan dalam nash-nash syariat. Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* sebagai sebuah masalah telah memenuhi prinsip kesesuaian dengan maqhashid alsyari'ah. *Kedua*, kemaslahatan harus meyakinkan arti kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa hal itu dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. *Ketiga*, kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Nilai-nilai *good governance* telah menjadi bagian yang diperintahkan oleh Alquran. Ini dapat berarti bahwa perintah-perintah tersebut adalah sejalan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah pengaruh penerapan *good village governance* dan pengendalian internal tersebut, dengan mengambil judul : **“Pengaruh Good Village Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** (Studi pada Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat).

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus pada pokok bahasan, naaka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam perspektif ekonomi islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>14</sup> Sri Warjiyati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik’, XVIII.1 (2018), 119–32.

1. Bagaimana pengaruh *good village governance* terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat?
3. Bagaimana pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat?
4. Bagaimana pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam perspektif ekonomi islam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh *good village governance* terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.
2. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.
3. mengetahui pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Baraat.
4. Mengetahui pengaruh *good village governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam perspektif ekonomi islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis secara pribadi dan masyarakat umum mengenai pengaruh *good village*

governance dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

- b) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi para pembaca dan masyarakat.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur kaya ilmiah baik itu berupa skripsi maupun jurnal, beberapa yang dimiliki kolerasi tema yang membahas mengenai Pengaruh good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah, maka penulis akan kemukakan terdapat dua versi yang pertama berskala nasional dan yang kedua berskala internasional beberapa diantaranya :

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayu Ni'matin Nada dan Novi Khoiriawati (2022)	Pengaruh <i>good governance</i> dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pada Kecamatan Wonodadi	Hasil yang diperoleh adalah secara parsial variabel penerapan good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. <sup>15</sup>
2	Fatma Karunia Hidayati dan	Pengaruh pengendalian internal dan good	Hasil penelitian ini adalah Variabel pengendalian internal dan good

<sup>15</sup> Ayu Ni and Novi Khoiriawati, "Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Pada Kecamatan Wonodadi", Vol. 4 No. 10 (2022), p. 4427-4435..

	Harjanti Widiastuti (2019)	government governance terhadap tindak pencegahan kecurangan.	government governance memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan. <sup>16</sup>
3	Fitriya Anggraini dan Praptiestrini (2021)	Pengaruh <i>good governance</i> dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (studi kasus kantor pemerintah desa di kecamatan karangmalang kabupaten sragen)".	Hasil penelitian ini adalah <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan desa dikecamatan Karangmalang kabupaten Sragen. <sup>17</sup>
4	Intan Rahayu dan R.Budi Hendaris (2021)	Pengaruh penerapan <i>good government governance</i> dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah (studi kasus kabupaten bandung barat)	Hasil penelitiannya adalah 1. <i>Good Government Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 2. Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 3. <i>Good Government Governance</i> dan Pengawasan Internal secara bersama-sama, berpengaruh

<sup>16</sup> Fatma Karunia Hidayati et al., “*Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan*”, 2019, p. 571–584.,

<sup>17</sup> Fitriya Anggraini and Praptiestrini, *Loc.Cit.*

			positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. <sup>18</sup>
5	Frisca Yustin Ardianty (2022)	Analisa Pengaruh Pemahaman Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , Pengendalian Intern, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali”	Hasil penelitiannya adalah 1. Pemahaman prinsip Good Corporate Governance, pengendalian intern dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada pemerintah Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali. 2. Pemahaman prinsip Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada pemerintah Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali. 3. Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada pemerintah Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada pemerintah Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali. <sup>19</sup>

<sup>18</sup> R.Budi Hendaris Intan Rahayu and Prodi, “NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE”, Vol. 9 No. 8 (2022), p. 2869–2879,.

<sup>19</sup> Frisca Yustin, 2022. *Analisa pengaruh pemahaman prinsip good corporate governance, pengendalian intern, komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah desa Kateguhan, Sawit, Boyolali*. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB AAS Indonesia. , vol 23 no (01).

6	Novita Iis Maryani (2019)	Pengaruh <i>good governance</i> dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan)	<p>1. Good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.</p> <p>2. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.</p> <p>3. Good governance dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>20</sup></p>
7	Mattoasi, dkk (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Gorontalo, semakin baik pengendalian internal yang ditetapkan dan dilaksanakan maka kinerja pemerintah daerah semakin dapat ditingkatkan. <sup>21</sup>
8	I Gede Iswara Yudhasena,	Pengaruh Good Government Governance,	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan good

<sup>20</sup> Novita Iis Maryani, "Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", 2019, p. 1–29.

<sup>21</sup> Mattoasia et al., *Loc.Cit.*



	dkk (2019)	Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	government governance berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Pengendalian Intern di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Budaya Organisasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. <sup>22</sup>
9	Teti Widia Komarawati, dkk (2020)	Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparatur	Good governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. <sup>23</sup>

<sup>22</sup> I Gede Iswara Yudhasena and I G. A. M. Asri Dwija Putri, "Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)", Vol. 28 (2019), p. 434,

<sup>23</sup> Teti Widia Komarawati and Darya Setia Nugraha, "Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Serta Implikasinya Pada Pelayanan Publik", 2020, p. 26–27.,

		Pemerintah Daerah serta Implikasinya pada Pelayanan Publik (Survey pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)	
10	Gito Saputro, dkk (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Tambaksari	1) pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya. 2) prinsip good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya good governance dalam sistem pemerintahan sangat diperlukan dalam semua kegiatan instansi pemerintah <sup>24</sup>

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Ayu Ni'matin Nada dan Novi Khoiriawati (2022), "Pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pada Kecamatan Wonodadi."

<sup>24</sup> Gito Saputro and David Efendi, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Tambaksari", Vol. 53 No. 9 (2021), p. 1-16,.

**Persamaan**, menggunakan variabel X dan Y yang sama yaitu good village governance dan pengendalian internal serta pada subjeknya ruang lingkup seluruh aparatur pemerintah desa di kecamatan. Dan selain itu sama sama menggunakan metode kuantitatif.

**Perbedaan**, terletak pada tempat lokasi penelitian yaitu di kecamatan pesisir utara kabupaten pesisir barat sedangkan penelitian sebelumnya pada kecamatan wonodadi. Selain itu juga pada penelitian ini ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

2. Fatma Karunia Hidayati dan Harianti Widiastuti (2019), “Pengaruh pengendalian internal dan good government governance terhadap tindak pencegahan kecurangan.”

**Persamaan**, menggunakan variabel X dan subjek serta metode penelitian yang sama yaitu pengendalian internal dan good governance serta metode kuantitatif dan di kantor pemerintahan desa.

**Perbedaan**, terletak pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan objek kinerja aparatur pemerintah desa dan lokasinya di Kecamatan Pesisir Utara. Selain itu juga pada penelitian ini ditinjau dari perspektif ekonomi islam yang mana belum dikaji oleh peneliti sebelumnya.

3. Fitriya Anggraini dan Praptiestrini (2021), “Pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (studi kasus kantor pemerintah desa di kecamatan karangmalang kabupaten sragen)”.

**Persamaan**, menggunakan variabel X yang sama yaitu good village governance dan pengendalian internal dan sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif selain itu menggunakan objek penelitian yang sama.

**Perbedaan**, terletak pada lokasi penelitian dan pada penelitian ini ditinjau dari perspektif ekonomi islam yang mana tidak dikaji oleh peneliti sebelumnya.

4. Intan Rahayu dan R.Budi Hendaris (2021), “Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat).

**Persamaan**, terletak pada variabel X dan metode penelitian yang digunakan, yaitu *good governance* dan pengawasan internal serta metode kuantitatif.

**Perbedaan**, terletak pada subjek dan lokasi penelitian, yaitu dimana pada penelitian ini subjeknya adalah aparatur pemerintah desa di kecamatan pesisir utara sedangkan peneliti sebelumnya di pemerintahan daerah kabupaten bandung barat, selain itu pada penelitian ini ditinjau dalam perspektif ekonomi islam yang memang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya.

5. Frisca Yustin Ardianty (2022), “Analisa Pengaruh Pemahaman Prinsip *Good Corporate Governance*, Pengendalian Intern, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali.”

**Persamaan**, terletak pada variabel X yaitu pengendalian internal dan objek penelitian yaitu kinerja pemerintah desa serta metode penelitian nya yaitu kuantitatif.

**Perbedaan**, terletak pada variabel X1 yaitu *good corporate governance* dan penambahan satu variabel yaitu komitmen organisasi sehingga berjumlah empat variabel, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel dan menggunakan variabel *good village governane* dan ditinjau dari perspektif ekonomi islam yang memang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya.

6. Novita Iis Maryani (2019), “Pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan).

**Persamaan**, terletak pada variabel X yaitu good governance dan pengendalian internal dan metode penelitian yaitu kuantitatif.

**Perbedaan**, terletak pada Objek penelitian yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan subjek penelitian serta lokasi penelitian. Dimana pada penelitian ini objek penelitiannya adalah kinerja aparatur pemerintah desa, dan subjeknya yaitu aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

7. Mattoasi, dkk (2021), “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.”

**Persamaan**, menggunakan variabel X dan Y yaitu pengendalian internal dan kinerja pemerintahan serta metode penelitiannya yaitu kuantitatif.

**Perbedaan**, terletak pada banyaknya variabel dan subjek serta lokasi penelitian. Dimana pada penelitian ini peneliti sebelumnya hanya menggunakan dua variabel. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel dan subjeknya pada aparatur pemerintah desa di kecamatan pesisir utara kabupaten pesisir barat. Selain itu juga pada penelitian ini ditinjau dari perspektif ekonomi islam, yang mana belum dikaji oleh peneliti sebelumnya.

8. I Gede Iswara Yudhasena, dkk (2019), “Pengaruh *Good Government Governance*, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).”

**Persamaan**, terletak pada variabel X yaitu good governance dan pengendalian internal dan objek penelitian yaitu tentang kinerja serta metode penelitian kuantitatif.

**Perbedaan**, terletak pada penambahan satu variabel X3 yaitu budaya organisasi selain itu subjek penelitiannya. Dimana pada penelitian ini menggunakan subjek aparatur

pemerintah desa di kecamatan pesisir utara dan juga ditinjau dalam perspektif ekonomi islam.

9. Teti Widia Komarawati, dkk (2020), “Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah serta Implikasinya pada Pelayanan Publik (Survey pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat).”

**Persamaan**, terletak pada variabel X yaitu good governance dan pengendalian internal dan objek penelitian yaitu tentang kinerja dan metode penelitian yaitu sama sama kuantitatif.

**Perbedaan**, terletak pada jumlah variabel dan subjek penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya penambahan satu variabel yaitu komitmen organisasi sehingga menjadi empat variabel dan subjek nya pada SKPD Bandung Barat. Sedangkan pada penelitian ini hanya tiga variabel dan subjek penelitian pada aparatur pemerintah desa di kecamatan pesisir utara kabupaten pesisir barat. Selain itu juga pada penelitian ini ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

10. Gito Saputro, dkk (2021), “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Tambaksari.”

**Persamaan**, terletak pada variabel X yaitu pengendalian internal dan good governance dan objek penelitian yaitu tentang kinerja.

**Perbedaan**, terletak pada subjek dan lokasi penelitian. Dimana pada penelitian ini subjek penelitian adalah aparatur pemerintah desa di kecamatan pesisir utara dan ditinjau dari perspektif ekonomi islam yang memang tidak dikaji oleh peneliti sebelumnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang permasalahan, identifikasi masalah dan batasan masalah penelitian ini, kemudian merumuskan masalah. Lalu ditetapkan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian disusun sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi terkait.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi teori yang dijelaskan secara detail sesuai teori yang diambil peneliti. Dalam landasan teori ini akan diuraikan secara diskriptif dari good governancel, pengendalian internal, dan kinerja. Kemudian terdapat kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi pendekatan dan sifat penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data. Berikutnya adalah penjelasan populasi, sampel, dan variabel penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian diuji dengan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi deskripsi data pembahasan hasil penelitian dan analisis data.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. *Good village governance* berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini berarti semakin baik Good Village Governance, maka semakin meningkat pula Kinerja Aparatur Pemerintah desa dikecamatan pesisir utara (Y)
2. Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal berpengaruh signifikan bagi Kinerja Aparatur Pemerintah desa dikecamatan pesisir utara, sehingga semakin baik Pengendalian Internal, maka semakin meningkat pula Kinerja Aparatur Pemerintah desa dikecamatan pesisir utara.
3. *Good village governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Berdasarkan hasil pengujian nilai Fhitung > Ftabel maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel Good Village Governance (X<sub>1</sub>), variabel Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di kecamatan pesisir Utara.
4. Aparatur pemerintah desa sudah menerapkan prinsip-prinsip islam dalam kegiatan ekonomi dilihat empat pilar ekonomi menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang juga di jadikan pedoman dalam bekerja oleh aparatur desa di kecamatan pesisir utara: 1) Tauhid yang berarti memandang bahwa segala pekerjaan yang terjadi di dunia adalah milik Allah manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya dengan baik tanapan mengabaikan perintah dan larangan-NYA. 2) Masalah/Kebermanfaatan yaitu setiap kebijakan yang dibuat pemerintah desa selalu berpihak untuk kepentingan masyarakat dan setiap program yang dirancang semata mata



bertujuan untuk kebermanfaatan masyarakat. 3) Adil berarti aparat pemerintah desa melayani masyarakat dengan adil tanpa mendiskriminasi dan aparat pemerintah desa mengalokasikan setiap program bantuan kepada masyarakat sudah sesuai dan tepat sasaran dengan yang benar benar yang membutuhkan. 4) Akhlak/Etika yaitu dalam bekerja Tidak hanya mencari keuntungan dunia (ekonomi global) semata tetapi juga keuntungan akhirat, Mengedepankan kejujuran dalam bekerja, Bersikap ramah tamah. Selain itu mereka juga berpedoman pada 4 sifat nabi yaitu shiddiq, Amanah, tabligh dan Fathanah dalam berkerja.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengurangi kinerja pegawai yaitu:

1. Instansi diharapkan dapat melakukan evaluasi berkala atas Kinerja Pegawai, terutama pegawai aparat desa dikecamatan Pesisir Utara kabupaten pesisir barat secara efektif.
2. Diharapkan kepada pihak kecamatan agar tetap mempertahankan atau lebih meningkatkan Kinerja Pegawai agar lebih baik dan efektif, serta agar lebih meningkatkan Pelayanan pada saat menyelesaikan fungsi dan tugas yang sudah ditetapkan
3. Masyarakat di harapkan memberikan masukan yang membangun guna mendukung kinerja aparat desa di kecamatan Pesisir Utara agar menjadi lebih baik lagi
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai Pemerintah desa dikecamatan Pesisir Utara kabupaten pesisir barat berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda. Responden yang digunakan dalam penelitian selanjutnya

sebaiknya lebih luas karena pada penelitian ini sampelnya masih sangat sempit cakupannya.





## DAFTAR RUJUKAN

- 1, Beatrix C.A. Muabuay et al. “Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengelolaan Prasarana Olahraga Di Kabupaten Mimika”. *JURNAL GOVERNANCE*. Vol. 1 no. 1 (2021), p. 1–8.
- Anggraini, Fitriya, and Praptiestrini. “Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa”. Vol. 3 no. 2 (2021), p. 111–120.
- Ardiyanti, Anita, and Yudi Nur Supriadi. “Efektivitas Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang”. Vol. 7 no. 2 (2018), p. 44–68.
- Arif, Muhammad Sulton et al. “JURNAL EKONOMI , MANAJEMEN , BISNIS DAN SOSIAL Good Governance Dalam Sudut Pandang Islam ( Penjelasan Al- Qur ’ an )”. Vol. 2 (2022), p. 207–218.
- Astuti, Widia. “Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt. Sarana Inti Persada Jakarta Selatan”. *JURNAL SeMaRaK*. Vol. 4 no. 3 (2021), p. 22. <https://doi.org/10.32493/smk.v4i3.13410>.
- Damayanti, Astri, and Ardi Hamzah (Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo). “Pengaruh E-Procurement Terhadap Good Governance”., 2019, 1–11.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: UNDIP, 2018 <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5780>.
- Handayani, Fitria Andalas, and Mohamad Ichsana Nur. “Implementasi Good Governance Di Indonesia”. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. Vol. 11 no. 1 (2019), p. 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Hasjimzoem, Yusnani. “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa”. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 no. 3 (2015), p. 463–476.

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>.

Helmayani, Putu Lia et al. "PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI GOOD VILLAGE GOVERNANCE". *SIAk Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8 (2017), p. 2.

Hidayati, Fatma Karunia et al. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan"., 2019, 571–584.

Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro, 2012.

Intan Rahayu, R.Budi Hendaris, and Prodi. "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE". Vol. 9 no. 8 (2022), p. 2869–2879.

Komarawati, Teti Widia, and Darya Setia Nugraha. "Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Serta Implikasinya Pada Pelayanan Publik"., 2020, 26–27.

Lusiana, Maria Grace, and Revi Arfamaini. "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Penjualan Kredit Pada PT. Tri Tehnik Perkasa". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. Vol. 6 no. 1 (2022), p. 32–49. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v6i1.1553>.

Maharani Dewi. "Ekonomi-Islam-Solusi-Terhadap-Masalah". *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*. Vol. 9950 no. June (2018), p. 20–34. (On-line), tersedia di: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1921> (2018).

Maryani, Novita Iis. "Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"., 2019, 1–29.

Mattoasia et al. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Mattoasia". Vol. 2 no. 2

(2021), p. 100–109.

Mustanir, Ahmad et al. “Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*. Vol. 2 no. 1 (2018), p. 67–84. (On-line), tersedia di: <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213> (2018).

Rumamby, Wulanintan Pricilla et al. “Evaluasi Implementasi Pengendalian Internal Berbasis Coso Pada PT. Moy Veronika”. *Jurnal EMBA*. Vol. 9 no. 2 (2021), p. 261–268.

Saputro, Gito, and David Efendi. “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Tambaksari”. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol. 53 no. 9 (2021), p. 1–16.

Soleh, Ahmad. “Strategi Pengembangan Potensi Desa”. *Jurnal Sungkai*. Vol. 5 no. 1 (2017), p. 35–52.

Sucihati, Roos Nana et al. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance”. Vol. 1 no. 1 (2021), p. 54–61.

Sugiman, Sugiman. “PEMERINTAHAN DESA”. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. Vol. 7 no. 1 (2018), p. 82–95.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D”. *Bandung: Alfabeta.*, 2019, hlm. 99-100.

Suyanto, Suyanto et al. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Kelayakan Pemberian Kredit Pada PT. BFI Finance Cabang Malang 1”. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*. Vol. 4 no. 1 (2016), p. 1–8. (On-line), tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/190195-ID-analisis-sistem-pengendalian-internal-da.pdf> (2016).

Weni Indrawati Dr. Irawan Suntoro, M.S., and M.Pd. Yunisca Nurnalisa, S.Pd. “Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tanggulingin”., 2019.

Wuri, Rendra Risto et al. “KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Di Desa Singsong Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)”. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1 no. 1 (2017), p. 107–115.

Yudhasena, I Gede Iswara, and I G. A. M. Asri Dwija Putri. “Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 28 (2019), p. 434. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p17>.

